

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Rangga Aditya

NPP. 32.0314

*Asdaf Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bngka Belitung*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [ranggaatyaa13@gmail.com](mailto:ranggaatyaa13@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Jona Bungaran Basuki Sinaga, S.STP, S.AP, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The main problem in this study is the suboptimal implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation in Bangka Regency. Although PKH is designed as conditional social assistance to improve the welfare of poor families, its implementation at the local level still faces various obstacles, such as limited number and capacity of social assistants, inconsistency of beneficiary data, geographical barriers, and low active participation of Beneficiary Families (KPM). In addition, there are not many academic studies that examine the PKH implementation process in depth in this region.* **Purpose:** *This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bangka Regency.* **Method:** *This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. Informants consist of social assistants, village officials, and KPM. Data were analyzed using thematic analysis techniques.* **Result:** *The results of the study indicate that PKH has increased poor families' access to education and health services. However, its implementation is still constrained by the high workload of assistants, outdated recipient data, limited infrastructure, and the less than optimal implementation of the Family Capacity Building Meeting (P2K2).* **Conclusion:** *The Family Hope Program has a significant contribution to poverty alleviation in Bangka Regency. However, its effectiveness needs to be improved through improving human resource capacity, data validity, availability of supporting infrastructure, and increasing active community participation and cross-sector collaboration.*

**Keywords:** *Family Hope Program, poverty, policy implementation, social assistants, Bangka Regency.*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka. Meskipun PKH dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, pelaksanaannya di tingkat lokal masih

menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas pendamping sosial, ketidaksesuaian data penerima manfaat, hambatan geografis, serta rendahnya partisipasi aktif Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, belum banyak kajian akademik yang mengupas proses implementasi PKH secara mendalam di wilayah ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari pendamping sosial, aparat desa, dan KPM. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH telah meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh beban kerja pendamping yang tinggi, data penerima yang tidak mutakhir, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). **Kesimpulan:** Program Keluarga Harapan memiliki kontribusi signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka. Namun, efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui perbaikan kapasitas sumber daya manusia, validitas data, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta kolaborasi lintas sektor.

**Kata kunci:** Program Keluarga Harapan, kemiskinan, implementasi kebijakan, pendamping sosial, Kabupaten Bangka.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk kebijakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia. Melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, PKH diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Bangka, program ini telah dijalankan sebagai bagian dari strategi nasional pengurangan kemiskinan, namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan kontekstual.

Bantuan sosial bersyarat telah banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang sebagai respons terhadap ketimpangan sosial dan rendahnya akses kelompok miskin terhadap layanan dasar. Menurut Bastagli *et al.* (2016), program seperti PKH dapat meningkatkan akses terhadap layanan publik serta mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat miskin apabila pelaksanaannya dilakukan secara konsisten dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada kapasitas implementasi di tingkat daerah.

Di tingkat lokal seperti Kabupaten Bangka, tantangan utama meliputi akurasi data penerima manfaat, keterbatasan sumber daya manusia pendamping, serta kendala geografis dalam menjangkau kelompok rentan. Seperti yang diungkapkan oleh Evans & Popova (2017), pelaksanaan program bantuan sosial bersyarat yang berhasil membutuhkan sistem pemantauan yang baik, pelatihan bagi pendamping, serta adaptasi terhadap konteks lokal. Keterlibatan

masyarakat dalam proses sosialisasi dan evaluasi juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap program.

Selain itu, keberhasilan implementasi PKH tidak hanya diukur dari penyaluran bantuan, tetapi juga dari perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan penerima. Dalam studi yang dilakukan oleh Handa *et al.* (2018), transfer tunai bersyarat yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan partisipasi anak di sekolah, kunjungan ibu ke fasilitas kesehatan, serta menurunkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap proses implementasi PKH di Kabupaten Bangka menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana program ini mampu menjawab persoalan kemiskinan lokal serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat miskin.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka, termasuk hambatan, strategi pelaksanaan, serta persepsi penerima manfaat dalam konteks lokal yang spesifik.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Fokus utama kajian masih terpusat pada dampak umum Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat atau keluarga penerima manfaat (KPM), baik dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara atau survei dan dilakukan di wilayah-wilayah yang berbeda, seperti Medan, Situbondo, dan Aceh Barat.

Secara rinci, penelitian Hariyati (2018) dan Muliana dkk. (2021) memfokuskan analisis pada dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum, tanpa menelaah secara mendalam proses implementasi program di tingkat lokal. Sementara itu, Hasna dkk. (2019) dan Sari dkk. (2020) membahas dampak sosial dan ekonomi dari bantuan PKH, tetapi tidak mengelaborasi peran aktor pelaksana atau kendala implementatif yang terjadi di lapangan. Syauqi (2019) memang menyoroti dampak sosial, namun masih bersifat umum dan belum mengangkat faktor-faktor pelaksana kunci seperti kualitas pendamping, infrastruktur pelayanan, atau pengelolaan data penerima manfaat. Dari keseluruhan studi, belum ada yang secara khusus mengkaji dinamika implementasi

PKH di wilayah Kabupaten Bangka, termasuk bagaimana tantangan geografis, sosial, administratif, serta kapasitas pendamping PKH memengaruhi efektivitas program. Padahal, seperti diketahui, keberhasilan sebuah kebijakan publik seperti PKH tidak hanya ditentukan oleh dampaknya, tetapi juga oleh sejauh mana proses implementasi berlangsung secara efektif, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Oleh karena itu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi dari kajian sebelumnya. Pertama, belum ditemukan studi yang secara khusus meneliti implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kabupaten Bangka, padahal daerah ini memiliki karakteristik sosial dan geografis yang unik yang dapat memengaruhi jalannya program. Kedua, kajian yang ada masih minim dalam menelusuri secara mendalam faktor-faktor pelaksanaan PKH, seperti kapasitas dan peran pendamping sosial, koordinasi antarinstansi pelaksana, serta kendala teknis dan non-teknis yang muncul di lapangan selama proses implementasi. Ketiga, masih kurangnya analisis terhadap respon dan partisipasi aktif keluarga penerima manfaat (KPM) dalam pelaksanaan program, padahal partisipasi tersebut penting untuk menilai sejauh mana program diterima dan berdampak secara jangka panjang. Terakhir, fokus utama penelitian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pada hasil atau dampak

PKH terhadap masyarakat, namun belum mengkaji secara mendalam proses implementasi yang menjadi bagian penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan sosial.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya dengan fokus utama pada dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Hariyati (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Kebijakan Pemerintah Akan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Terjun Medan Marelan” menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui sejauh mana PKH berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan, program ini belum mampu secara signifikan mengentaskan kemiskinan dari sisi ekonomi. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik sebagai landasan analisis.

Selanjutnya, penelitian oleh Hasna dkk. (2019) yang berjudul “Analisis Dampak Pemberian Bantuan PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak ganda: dampak positif berupa meningkatnya kualitas kesehatan, dan dampak negatif berupa tidak seimbangnnya perkembangan di sektor pendidikan. Penelitian ini berlandaskan pada teori kesejahteraan.

Penelitian lain oleh Syauqi (2019) dengan judul “Dampak Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo” menggunakan metode survei. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sosial dari PKH dan menemukan bahwa program tersebut memberikan pengaruh sosial yang cukup signifikan terhadap keluarga penerima manfaat. Landasan teori yang digunakan adalah teori fungsionalisme struktural.

Sari dkk. (2020) melalui penelitiannya berjudul “Dampak Sosial Ekonomi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH Exit Mandiri) dalam Perspektif *The Most Significant Change Technique (MSCT)*” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa PKH telah memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif meliputi peningkatan kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan KPM, sedangkan dampak negatifnya adalah rendahnya kepatuhan sebagian KPM terhadap ketentuan program. Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial sebagai kerangka analisis.

Terakhir, Muliana dkk. (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa dana PKH membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendorong terjadinya perubahan positif dalam rumah tangga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesejahteraan sosial.

Dari keseluruhan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas studi masih berfokus pada dampak program terhadap kesejahteraan, baik secara sosial, ekonomi, maupun pendidikan, dengan pendekatan deskriptif dan tanpa mengeksplorasi lebih jauh aspek implementasi teknis, kelembagaan, serta tantangan lokal dalam pelaksanaan PKH.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam kajian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menitikberatkan pada aspek implementasi program di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Bangka, yang belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada dampak atau hasil program terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa membahas secara mendalam proses pelaksanaan, hambatan teknis dan sosial, serta dinamika pelibatan aktor pelaksana seperti pendampingan sosial dan aparat desa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang berbasis konteks lokal, dengan menggali bagaimana karakteristik geografis, kondisi sosial, serta kapasitas kelembagaan daerah memengaruhi efektivitas pelaksanaan PKH. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti partisipasi aktif dan persepsi keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap proses implementasi, yang menjadi aspek penting namun belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai kebijakan bantuan sosial bersyarat di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan PKH di daerah, terutama melalui pemetaan faktor-faktor penghambat dan pendukung di lapangan.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaannya sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara holistik dengan menitikberatkan pada konteks, makna, serta dinamika hubungan antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Dalam konteks kebijakan publik, metode ini dianggap paling tepat untuk mengkaji proses implementasi program pemerintah karena mampu mengungkap faktor-faktor pendukung dan kendala secara mendalam (Kurniawan, 2018). Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti menyajikan realitas sosial secara deskriptif dan utuh, sebagaimana ditegaskan oleh Supriadi (2019).

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Informan utama terdiri dari pendamping sosial, aparat desa, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan PKH. Pemilihan mereka didasarkan pada peran strategis dalam proses implementasi dan potensi memberikan informasi yang kaya serta mendalam. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Purwanto (2018), yang menekankan pentingnya memahami interaksi antara kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat dalam konteks sosial dan struktural.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terkait pelaksanaan PKH di Kabupaten Bangka. Penelitian ini

dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di sejumlah lokasi pelaksanaan PKH, termasuk Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bangka, kantor kecamatan, serta rumah-rumah KPM yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Belinyu, Riau Silip, Pemali, dan Sungailiat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan dinamika utama yang berkaitan dengan faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini merupakan kajian dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan telah dianalisis dengan pendekatan deskriptif, berlandaskan teori implementasi kebijakan dari (Purwanto, 2018). Peneliti terlebih dahulu mengkaji regulasi terkait, yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, sebagai dasar hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang mencakup tujuan, sasaran, kriteria, hingga proses implementasi. Selanjutnya dilakukan observasi ke Dinas Sosial sebagai pelaksana program dan wawancara dengan informan yang relevan. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif melalui uraian dan kutipan langsung dari narasumber, yang kemudian dianalisis untuk menggambarkan implementasi kebijakan PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka.

#### **3.1. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangka**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau individu miskin serta rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada keluarga penerima manfaat (KPM) agar mampu memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat miskin diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, seperti pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi anak, serta mendorong keikutsertaan anak-anak dalam jenjang pendidikan dasar hingga menengah secara berkelanjutan.

##### **a. Kualitas Kebijakan**

Dimensi kualitas kebijakan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka. Dimensi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan dirumuskan dengan jelas, mencakup kejelasan tujuan, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, serta keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaannya. Ketiga indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan PKH dalam mendukung penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan PKH memiliki tujuan yang tegas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permensos Nomor 1 Tahun 2018, yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Selain itu, kebijakan ini mendorong peningkatan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka juga menguatkan bahwa bantuan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam

menjamin keberlangsungan hidup kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Relevansi kebijakan PKH terlihat dari kesesuaiannya dengan kebutuhan mendasar KPM, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. PKH mencakup berbagai kelompok sasaran yang luas seperti ibu hamil/menyusui, anak usia dini hingga sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. Dengan cakupan tersebut, bantuan PKH memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan KPM, baik dalam bentuk peningkatan akses layanan dasar maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kesesuaian antara bantuan dan kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki relevansi tinggi.

Pelaksanaan kebijakan PKH di Kabupaten Bangka melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis, pendamping sosial, dan lembaga layanan pendidikan dan kesehatan. Menurut Kepala Dinas Sosial, keterlibatan para pihak dalam memastikan tersalurkannya bantuan dan tercapainya tujuan program menjadi bagian penting dalam menjamin keberhasilan implementasi. Stakeholder tidak hanya berperan dalam pelaksanaan teknis, tetapi juga dalam advokasi dan pendampingan sosial kepada KPM agar bantuan yang diterima benar-benar berdampak pada perubahan kondisi hidup mereka.

Berdasarkan tiga indikator tersebut, kualitas kebijakan PKH di Kabupaten Bangka dinilai cukup baik. Tujuan program yang jelas, relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat miskin, serta keterlibatan aktif stakeholder menunjukkan bahwa PKH merupakan kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, dimensi kualitas kebijakan ini mendukung efektivitas PKH dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

#### **b. Kecukupan Input Kebijakan**

Dimensi kecukupan input kebijakan merupakan aspek penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka. Dimensi ini mengacu pada tersedianya sumber daya yang mencukupi, baik secara finansial, kelembagaan, manusia, maupun infrastruktur pendukung lainnya untuk menunjang proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Menurut Hamid (2018), perencanaan kebijakan publik yang efektif sangat dipengaruhi oleh kesiapan input seperti SDM dan anggaran yang konsisten di lapangan. Ketersediaan input yang memadai diharapkan dapat memastikan efektivitas kebijakan dan mengurangi risiko kegagalan implementasi.

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bangka didukung oleh struktur sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 10 Tahun 2017, yang meliputi tenaga ahli, koordinator wilayah, koordinator kabupaten/kota, dan pendamping sosial. Pendamping sosial memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan PKH berjalan sesuai sasaran, mulai dari verifikasi data hingga pemantauan pemanfaatan bantuan oleh KPM. Wawancara dengan pendamping menunjukkan bahwa mereka juga menjadi penghubung antara KPM, kecamatan, dan dinas sosial. Meski demikian, jumlah pendamping yang ada masih dirasa kurang dibandingkan beban kerja yang harus ditangani.

Fasilitas dan mekanisme pelaksanaan PKH di Kabupaten Bangka telah berjalan sesuai ketentuan, mulai dari tahap perencanaan hingga penyaluran bantuan dan

pendampingan. Semua tahapan dilaksanakan dengan dukungan dari Dinas Sosial dan pihak kecamatan. Pendamping turut memastikan bahwa pelaksanaan program di lapangan telah difasilitasi dan dipantau dengan baik. Kesiapan infrastruktur ini menunjang kelancaran setiap proses, termasuk penanganan kendala teknis yang mungkin terjadi.

PKH di Kabupaten Bangka didanai melalui APBN yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial dan disalurkan langsung ke rekening KPM melalui bank Himbara (seperti BRI, BNI, dan Mandiri). Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, bertugas memastikan validitas data dan pendistribusian dana agar tepat sasaran. Dana diberikan berdasarkan kategori penerima seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas, serta dicairkan secara bertahap sesuai kebijakan nasional.

Keakuratan data KPM menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Di Kabupaten Bangka, pendamping PKH secara rutin melakukan verifikasi dan pemutakhiran data untuk menghindari salah sasaran. Selain itu, koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah daerah, dan pusat berlangsung cukup baik. Setiap kendala dilaporkan dan ditindaklanjuti secara cepat untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Secara umum, kecukupan input kebijakan PKH di Kabupaten Bangka telah memadai dan mendukung efektivitas pelaksanaan program. Dukungan dari segi anggaran, infrastruktur, mekanisme pelaksanaan, dan koordinasi lintas lembaga menunjukkan bahwa program berjalan sesuai rencana. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan dalam hal jumlah dan distribusi pendamping sosial agar pelaksanaan kebijakan lebih merata dan optimal dalam menjangkau seluruh KPM di wilayah tersebut.

### **c. Ketepatan Instrumen**

Dimensi ketepatan instrumen dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka mengacu pada kesesuaian alat, mekanisme, dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan. Ketepatan instrumen ini mencakup proses identifikasi penerima, penyaluran bantuan, pemanfaatan dana, serta pemantauan pelaksanaan di lapangan. Ketepatan instrumen sangat penting agar program berjalan sesuai sasaran dan menghasilkan dampak yang optimal bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penentuan KPM di Kabupaten Bangka mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan di lapangan, sebagian besar penerima bantuan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Meskipun demikian, validasi masih menjadi tantangan, terutama jika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak langsung terdata. Hal ini ditegaskan oleh Camat Riau Silip yang menyebut bahwa meski data cukup akurat, perubahan kondisi ekonomi KPM masih seringkali belum langsung tercatat. Cahyadi *et al.* (2020) menyatakan bahwa keberhasilan program bantuan tunai bersyarat sangat dipengaruhi oleh kualitas desain dan ketepatan implementasi di tingkat lokal.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank Himbara dan secara umum berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan. Tingkat keterlambatan pencairan dana tergolong rendah, meskipun terdapat beberapa kendala teknis seperti keterbatasan akses perbankan

di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tergolong tepat dan efisien dalam menjangkau penerima manfaat, namun tetap memerlukan perbaikan infrastruktur layanan perbankan di wilayah tertentu.

Mayoritas KPM memanfaatkan dana bantuan sesuai dengan tujuan utama program, yaitu mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Namun, masih ditemukan sebagian kecil KPM yang menggunakan dana untuk keperluan konsumtif yang tidak mendukung tujuan program. Oleh karena itu, pendamping sosial melakukan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan agar dana digunakan secara bijak sesuai ketentuan. Ketepatan penggunaan dana menjadi bagian penting dalam menjaga keberhasilan program secara jangka panjang.

Pemantauan rutin dilakukan oleh pendamping sosial di masing-masing wilayah untuk memastikan bahwa KPM menjalankan kewajiban program, seperti kunjungan kesehatan dan kehadiran sekolah anak. Evaluasi menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi dari KPM, yang berarti bahwa instrumen pemantauan berjalan efektif. Peran pendamping sangat krusial dalam memastikan bahwa bantuan tidak hanya diterima, tetapi juga dimanfaatkan dengan benar sesuai syarat dan tujuan PKH.

Secara keseluruhan, instrumen yang digunakan dalam implementasi PKH di Kabupaten Bangka dapat dikatakan tepat dan efektif. Ketepatan data, mekanisme penyaluran yang efisien, serta pemantauan yang konsisten memberikan hasil positif terhadap kepatuhan dan pemanfaatan bantuan oleh KPM. Meskipun masih terdapat tantangan seperti validasi data dinamis dan pemanfaatan dana oleh sebagian kecil penerima, langkah-langkah edukatif dan pembaruan data rutin menjadi solusi penting untuk menjaga keberlanjutan efektivitas instrumen kebijakan PKH.

#### **d. Kapasitas Implementor**

Dimensi kapasitas implementor merujuk pada kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) secara efektif di lapangan. Di Kabupaten Bangka, peran utama implementor dipegang oleh para pendamping sosial yang bertugas melakukan edukasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kapasitas implementor ini mencakup jumlah, kualifikasi, pelatihan, serta efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan program PKH sangat bergantung pada seberapa optimal para pendamping menjalankan perannya.

Jumlah pendamping PKH di Kabupaten Bangka masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah KPM. Saat ini terdapat 37 orang pendamping yang masing-masing harus menangani 100–200 KPM, yang menyebabkan beban kerja tinggi. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas pengawasan dan pendampingan yang diberikan kepada setiap keluarga, sehingga perlu adanya penambahan personel agar beban kerja lebih proporsional dan distribusi tugas lebih efisien.

Secara umum, kualifikasi pendidikan para pendamping cukup relevan, yaitu lulusan sarjana di bidang sosial, kesejahteraan sosial, atau bidang lain yang berkaitan. Proses perekrutan juga mempertimbangkan pengalaman di bidang pendampingan masyarakat. Meski demikian, ada beberapa pendamping yang berasal dari latar belakang pendidikan non-sosial namun tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik berkat pengalaman dan pelatihan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi implementor cukup kuat dalam menjalankan program.

Para pendamping telah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, baik pelatihan teknis seperti penggunaan sistem e-PKH dan pemutakhiran data, maupun pelatihan sosial seperti pendekatan komunikasi dan pemberdayaan ekonomi. Namun, frekuensi dan cakupan materi pelatihan masih dirasa kurang. Pendamping berharap pelatihan lebih rutin dan mencakup topik manajemen kasus serta strategi pemberdayaan ekonomi untuk membantu KPM mencapai kemandirian.

Secara keseluruhan, kapasitas implementor PKH di Kabupaten Bangka dari sisi kualitas tergolong baik, didukung oleh latar belakang pendidikan yang relevan, pelatihan yang memadai, dan pemahaman tugas yang jelas. Namun demikian, tantangan utama terletak pada aspek kuantitas pendamping yang belum sebanding dengan jumlah KPM yang harus dilayani. Penambahan jumlah pendamping dan peningkatan kualitas pelatihan secara berkelanjutan menjadi langkah strategis agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih optimal dan merata. Simangunsong (2019) menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat tergantung pada kompetensi teknis dan komitmen moral para pelaksananya.

#### **e. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran**

Dimensi karakteristik dan dukungan kelompok sasaran menyoroti pentingnya koordinasi, komunikasi, dan keterlibatan antara pelaksana kebijakan dan para penerima manfaat dalam mendukung efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Dukungan dari stakeholder dan pemahaman serta keterlibatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat menentukan apakah kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bangka melibatkan koordinasi antara berbagai pihak seperti Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, bank Himbara, dan media massa. Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, koordinasi yang baik antar stakeholder dan pelaksana program menjadi kunci dalam memastikan keberlangsungan pelaksanaan PKH, termasuk dalam menyelesaikan kendala teknis yang muncul di lapangan seperti perubahan aplikasi data KPM. Fitritinia & Matsuyuki (2023) juga menekankan bahwa efektivitas program perlindungan sosial sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk merespons dinamika dan bencana yang mempengaruhi kelompok rentan.

Aparatur pelaksana seperti Dinas Sosial, koordinator wilayah, dan para pendamping dituntut untuk memahami kebijakan PKH secara menyeluruh agar dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Pemahaman ini penting dalam proses validasi data, pendampingan KPM, serta penyelesaian kendala seperti penghapusan data penerima akibat kesalahan input, sebagaimana dialami oleh salah satu KPM yang sempat tidak menerima bantuan selama dua tahun.

Partisipasi aktif KPM dalam memahami status kepesertaan serta melaporkan kendala secara langsung kepada pendamping menunjukkan adanya dukungan dari kelompok sasaran terhadap program. Respons seperti pelaporan mandiri atas permasalahan data, serta kesiapan untuk diverifikasi ulang, mencerminkan keterlibatan KPM yang berdaya dan kooperatif. Hal ini mendorong keberhasilan pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Keberhasilan PKH juga dilihat dari menurunnya jumlah masyarakat miskin dan adanya KPM yang secara sukarela melepaskan diri dari bantuan karena telah mandiri.

Evaluasi berdasarkan jumlah penerima bantuan yang menurun dan proses verifikasi data yang akurat menjadi indikator penting efektivitas program. KPM yang tidak lagi membutuhkan bantuan harus segera digantikan oleh mereka yang lebih membutuhkan agar bantuan tetap tepat sasaran.

Pelaksana kebijakan di lapangan telah menunjukkan tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugas. Menurut pernyataan pendamping PKH, baik stakeholder maupun SDM pelaksana telah bekerja dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Rasa tanggung jawab ini penting dalam menjaga keberlangsungan program dan memastikan bahwa kebijakan benar-benar bermanfaat bagi sasaran yang dituju.

Secara keseluruhan, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran dalam implementasi PKH di Kabupaten Bangka sudah berjalan cukup baik. Koordinasi antar lembaga, komunikasi dengan KPM, serta sikap aktif dan bertanggung jawab dari pelaksana dan penerima manfaat menunjukkan bahwa kebijakan ini telah diterima dan dijalankan dengan komitmen yang tinggi. Meski masih terdapat kendala teknis seperti validasi data, hal tersebut dapat diatasi melalui kerja sama yang solid antar pihak terkait.

**f. Kondisi Lingkungan, Geografi, Ekonomi, dan Politik**

Dimensi kondisi lingkungan, geografi, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka. Menurut konsep dari Erwan Agus Purwanto (2018), faktor-faktor ini dapat menjadi penunjang maupun hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan, tergantung pada bagaimana pemerintah dan pelaksana mampu mengelolanya dengan baik dalam konteks lokal.

PKH memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya dalam membantu keberlangsungan pendidikan anak dan akses layanan kesehatan. Berdasarkan testimoni penerima, bantuan ini sangat meringankan beban biaya pendidikan anak serta mendukung kebutuhan khusus seperti disabilitas. Sejak menerima bantuan pada 2019, terjadi peningkatan kesejahteraan secara nyata, menunjukkan bahwa PKH telah membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dukungan dari elite politik lokal juga memperkuat implementasi PKH. Bupati Bangka memberikan bantuan 37 unit sepeda motor kepada para pendamping sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas dedikasi mereka. Selain itu, Dinas Sosial memberikan penghargaan kepada pendamping berprestasi untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja mereka. Bantuan ini terbukti sangat membantu mobilitas pendamping di lapangan, sebagaimana disampaikan oleh salah satu pendamping PKH dalam wawancara, yang merasakan langsung manfaat dukungan politik tersebut.

Kondisi geografis Kabupaten Bangka yang bervariasi antara dataran rendah, perbukitan, dan wilayah pesisir memunculkan tantangan tersendiri dalam distribusi bantuan dan pelaksanaan PKH. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Belinyu masih memiliki keterbatasan akses jalan, terutama saat musim hujan, yang menghambat mobilitas pendamping dalam menjangkau KPM. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menjamin kesetaraan pelayanan program di seluruh wilayah.

Secara umum, faktor ekonomi, politik, dan geografis di Kabupaten Bangka telah mendukung pelaksanaan PKH, meskipun terdapat beberapa hambatan terutama pada

aspek geografis di wilayah terpencil. Dampak positif terhadap kesejahteraan KPM, dukungan nyata dari pemerintah daerah, serta strategi pelaksanaan yang adaptif menjadi kekuatan utama. Namun, peningkatan infrastruktur dan pemerataan akses tetap diperlukan agar pelaksanaan PKH dapat merata dan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Bangka.

Meskipun implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka menunjukkan banyak kemajuan dari berbagai dimensi, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu hambatan utama terletak pada aspek teknis, khususnya terkait sistem aplikasi PKH. Pergantian sistem aplikasi menyebabkan ketidaksesuaian dan bahkan penghapusan data beberapa KPM secara otomatis, yang berdampak langsung pada tidak tersalurkannya bantuan. Akibatnya, pendamping sosial harus bekerja lebih ekstra dalam melakukan pengecekan dan validasi ulang data untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan hak para penerima manfaat.

Selain hambatan teknis, faktor penghambat lainnya berasal dari ketidaksesuaian antara kriteria penerima bantuan yang tercantum dalam kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana masyarakat yang tergolong miskin secara ekonomi tidak memenuhi kriteria administratif, seperti kepemilikan rumah atau kendaraan, sehingga tidak lolos sebagai KPM. Hal ini menuntut para pendamping untuk melakukan penyesuaian dan penilaian yang lebih fleksibel agar bantuan tetap dapat menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Kondisi geografis Kabupaten Bangka yang cukup beragam, dengan keberadaan wilayah pesisir dan desa-desa terpencil, juga menjadi tantangan tersendiri. Aksesibilitas yang terbatas terutama saat musim hujan menyulitkan pendamping dalam menjangkau lokasi-lokasi tertentu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi PKH, perlu dilakukan penguatan sistem data yang lebih stabil, fleksibilitas kebijakan dalam menentukan kriteria penerima, serta perbaikan infrastruktur akses menuju daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ketiga aspek ini menjadi kunci agar PKH dapat terlaksana secara merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka. Hadna & Askar (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial bersyarat seringkali memiliki hasil yang tidak merata, sehingga dibutuhkan pendekatan yang adaptif dan kontekstual.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum lebih banyak menyoroti dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hariyati (2018), Hasna dkk. (2019), dan Muliana dkk. (2021) menekankan bahwa PKH mampu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, meskipun belum sepenuhnya mampu mengentaskan kemiskinan secara struktural. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut belum menelaah secara komprehensif proses implementasi program di tingkat lokal.

Aspek-aspek penting seperti peran dan kapasitas pendamping sosial, koordinasi antarinstansi, validitas data penerima manfaat, serta keterbatasan infrastruktur daerah belum mendapat perhatian yang memadai dalam kajian sebelumnya. Selain itu, karakteristik lokal seperti tantangan geografis, partisipasi aktif keluarga penerima manfaat (KPM), serta persepsi

mereka terhadap tujuan program juga belum banyak dikaji secara mendalam. Fokus utama masih terpusat pada hasil atau *outcome* program, sementara proses implementasi sebagai bagian krusial dalam kebijakan publik belum banyak dieksplorasi.

Kekosongan inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan kajian, khususnya dalam hal pemahaman terhadap dinamika pelaksanaan PKH di daerah-daerah dengan kondisi sosial dan geografis yang khas, seperti Kabupaten Bangka. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mampu memberikan pemahaman lebih mendalam tentang proses implementasi PKH, baik dari segi input kebijakan, ketepatan instrumen, kapasitas pelaksana, dukungan kelompok sasaran, maupun kondisi lingkungan yang memengaruhi jalannya program di tingkat akar rumput.

holistik dan partisipatif, akan menjadikan kebijakan manajemen talenta sebagai dokumen administratif semata, tanpa dampak nyata terhadap pengembangan SDM aparatur di daerah.

### **3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Salah satu temuan menarik dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka adalah adanya keterlibatan aktif dari masyarakat penerima manfaat yang menunjukkan peningkatan kesadaran sosial. Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara sukarela mengundurkan diri dari program karena merasa telah mandiri secara ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan dampak finansial jangka pendek, tetapi juga menumbuhkan nilai kemandirian di kalangan masyarakat miskin. Hal ini sekaligus memperlihatkan keberhasilan PKH dalam mendorong transformasi sosial dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Temuan lain yang cukup menarik adalah bahwa meskipun peran utama pelaksana program berada di tangan pemerintah dan pendamping sosial, media massa lokal juga ikut memainkan peran dalam menyebarkan informasi serta membentuk opini publik mengenai PKH. Dalam beberapa kasus, media berperan membantu menyalurkan keluhan masyarakat dan mendorong transparansi data. Keterlibatan media ini memperluas jangkauan pengawasan sosial terhadap implementasi program dan memperkuat akuntabilitas pelaksana kebijakan, khususnya dalam menanggapi isu-isu teknis seperti kesalahan input data atau keterlambatan pencairan.

Selain itu, adanya inisiatif lokal seperti pemberian penghargaan kepada pendamping berprestasi dan bantuan kendaraan operasional oleh pemerintah daerah menunjukkan bentuk pengakuan yang efektif dalam meningkatkan motivasi pelaksana di lapangan. Penghargaan semacam ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang lebih kompetitif dan produktif di antara pendamping PKH. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sosial seperti PKH tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan atau sumber daya, tetapi juga oleh penguatan aspek penghargaan non-material yang berdampak pada semangat dan loyalitas pelaksana program.

## **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka telah memberikan kontribusi positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini berhasil menjangkau kelompok masyarakat rentan dengan karakteristik sosial ekonomi yang membutuhkan intervensi bersyarat dari pemerintah. Keberadaan pendamping sosial dan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) turut memperkuat proses pemberdayaan dan transformasi sosial pada tingkat rumah tangga. Meskipun demikian, tantangan signifikan seperti keterbatasan jumlah pendamping, rendahnya pemahaman KPM

terhadap tujuan program, serta keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di beberapa wilayah masih menjadi penghambat utama dalam pencapaian target PKH secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, keberhasilan PKH di Kabupaten Bangka sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosial, koordinasi lintas sektor, dan inovasi dalam pendekatan pelaksanaan program. Diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mendampingi keluarga penerima manfaat. Kolaborasi antarinstansi dan pendekatan yang lebih kontekstual, baik secara geografis maupun budaya lokal, menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas implementasi PKH. Dengan memperhatikan tantangan dan potensi yang ada, PKH di Kabupaten Bangka memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen perubahan sosial yang bukan hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat miskin secara jangka panjang.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini lebih menekankan pada aspek implementasi kebijakan (input, proses, dan output), bukan pada evaluasi kuantitatif dampak terhadap tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis mengenai efektivitas PKH dalam menurunkan angka kemiskinan masih bersifat deskriptif dan kualitatif.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Arah penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi dampak PKH secara empiris terhadap penurunan angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bangka, para pendamping Program Keluarga Harapan, aparat desa, serta seluruh informan yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kerja sama selama proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas implementasi kebijakan PKH dan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., & Schmidt, T. (2016). Cash transfers: What does the evidence say? A rigorous review of programme impact and of the role of design and implementation features. *Overseas Development Institute (ODI)*. <https://odi.org/en/publications/cash-transfers-what-does-the-evidence-say-a-rigorous-review-of-impacts-and-the-role-of-design-and-implementation-features/>
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110. <https://doi.org/10.1257/pol.20190245>
- Evans, D. K., & Popova, A. (2017). Cash transfers and temptation goods: A review of global evidence. *The World Bank Research Observer*, 32(2), 275–294. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/617631468001808739/cash-transfers-and-temptation-goods-a-review-of-global-evidence>

- Fitritia, I. S., & Matsuyuki, M. (2023). Social protection for climate-disasters: A case study of the Program Keluarga Harapan cash transfer program for smallholder farm household in Indonesia. *Progress in Disaster Science*, 17, 100278. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2023.100278>
- Hadna, A. H., & Askar, M. W. (2022). The impact of conditional cash transfers on low-income individuals in Indonesia. *ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 15(1). <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0067>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Handa, S., Park, M., Darko, R. O., & Osei, R. D. (2018). *Livelihood Empowerment Against Poverty (LEAP) Program Impact Evaluation Report*. UNICEF Office of Research. [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089ad40f0b649740001f2/LEAP\\_Impact\\_Evaluation\\_FINAL2014march17.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089ad40f0b649740001f2/LEAP_Impact_Evaluation_FINAL2014march17.pdf)
- Hariyati, S. (2018). Dampak Kebijakan Pemerintah Akan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Terjun Medan Marelان. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Hasna, N. M., Nugraha, N., & Mustikarini, I. D. (2019). Analisis Dampak Pemberian Bantuan PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Publik*. <https://core.ac.uk/download/pdf/287227324.pdf>
- Kurniawan, E. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kebijakan Publik*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Muliana, L., Mursyidin, M., & Siregar, M. (2021). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 92-96. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/3417>
- Purwanto, E. A. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Sari, A. O., Sulistyowati, R., & Prihantika, I. (2020). Dampak Sosial Ekonomi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri dalam Perspektif the Most Significant Change Technique (MSCT). 2. <https://www.researchgate.net/publication/348210287>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, M. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriadi, D. (2019). Analisis Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Syauqi, N. (2019). Dampak Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99425>